

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Teoritis

Teori adalah seperangkat proporsi yang terintegrasi secara sintaksis yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati (Neumen dalam Sugiyono, 2010:52).

Beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Peranan

Peranan adalah keikutsertaan atau sumbangsih dari seseorang dalam melakukan sesuatu kegiatan. Peranan berasal dari kata peran, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai pemain. Menurut kamus bahasa Inggris, peranan (*role*) dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan didefinisikan sebagai aktivitas yang diharapkan dari suatu kegiatan yang menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan juga dapat diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab, dan lainnya), dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi.

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan sesuatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling bergantung satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. (Soekanto, 2002 : 268 – 269).

Menurut Levinson dalam Soekanto (2009 : 213) teori peranan mencakup tiga hal, yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Abdulsyani (2007: 94) peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Pelaku peranan dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dengan masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka

selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru.

Menurut Soekanto dalam buku yang berjudul *sosiologi suatu pengantar* (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Ralph Linton dalam Soekanto (2012: 213) melalui buku *Sosiologi Suatu Pengantar* dijelaskan bahwa, peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*yaitu social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Berdasarkan Penjelasan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa peranan adalah baik individu atau kelompok yang memiliki status di mata masyarakat yang akan terjadi adanya suatu hak dan kewajiban yang berpengaruh dalam mendorong perkembangan kehidupan masyarakat baik secara sempit ataupun luas.

Keterkaitan permasalahan penulis dalam menggunakan teori ini, karena K.H.Abdul Halim memiliki peranan sebagai tokoh ulama berpemikiran pembaharu, tokoh organisator dan orang asli Majalengka yang aktif dalam perjuangannya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Majalengka. Peranan tersebut dapat dilihat dari pendirian organisasi yang bergerak dalam bidang dakwah dan pendidikan. Pendirian dan pengembangan Madrasah dan Kweekschool membawa perubahan kepada pendidikan Islam di Majalengka pada saat itu.

2. Lembaga Pendidikan Islam

a. Pengertian Lembaga Pendidikan Islam

Secara etimologi, lembaga adalah asal sesuatu, acuan, sesuatu yang memberi bentuk pada yang lain, badan atau organisasi yang bertujuan untuk melakukan suatu usaha. Dalam bahasa Inggris *Institute* (dalam pengertian fisik), yaitu sarana atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan lembaga dalam pengertian non fisik atau abstrak disebut *Institution*, yaitu suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Lembaga dalam pengertian fisik disebut juga dengan *bangunan*, dan lembaga dalam pengertian non fisik disebut dengan *pranata*.

Secara terminologi dari kutipan Ramayulis oleh Hasan Langgukung, bahwa lembaga pendidikan adalah suatu sistem peraturan yang bersifat abstrak, suatu konsepsi yang terdiri dari kode-kode, norma-norma, ideologi-ideologi dan sebagainya, baik tertulis atau tidak, termasuk perlengkapan materi dan organisasi simbolik, kelompok manusia yang terdiri dari individu-individu yang dibentuk sengaja atau tidak, untuk mencapai tujuan tertentu dan tempat-tempat kelompok itu melaksanakan peraturan-peraturan tersebut adalah masjid, sekolah, kuttab dan sebagainya (Ramayulis, 2011: 227).

Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga pendidikan Islam menurut Hasbullah adalah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam yang bersamaan dengan proses pembudayaan. Dalam operasionalitasnya selalu mengacu dan tanggap kepada kebutuhan perkembangan masyarakat. Tanpa bersikap demikian, lembaga pendidikan islam dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan kultural.. Dari sinilah timbul krisis pendidikan yang intensitasnya berbeda-beda menurut tingkat atau taraf kebutuhan masyarakat. Karena itu, lembaga-lembaga pendidikan islam haruslah sesuai dengan tuntutan dari aspirasi masyarakat, Tanpa memperhatikan hal tersebut, Untuk mencapai kemajuan dalam perkembangannya agak sulit (Hasbullah, 1996: 38-39).

Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan Islam bisa didapatkan melalui lembaga pendidikan diantaranya :

1) Masjid/Surau

Dalam sejarah umat islam masjid merupakan lembaga pendidikan pertama setelah rumah. Di masjid inilah terkumpul berbagai persoalan kaum muslimin, mulai dari masalah ekonomi, agama, kebudayaan sampai kemasyarakatan, oleh karena itu kaum muslimin berkumpul di masjid hendaknya untuk musyawarah dan bertukar pendapat tentang segala masalah atau urusan yang berkaitan dengan kehidupan sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan (Al-Jambulati, 1994: 24).

Masjid juga berperan sebagai media dakwah yang potensial bagi umat muslim, artinya masjid mengubah masyarakat menjadi mandiri, kemandirian sosial, ekonomi ditingkat bawah (Kuntowijoyo, 1994: 132).

Sebagai lembaga pendidikan tradisional, masjid menggunakan sistem pendidikan *halaqah*, materi pendidikan yang diajarkan pada awalnya masih disepuh huruf hijaiyah dan membaca Al-qur'an, disamping ilmu-ilmu keislaman lainnya seperti keimanan, akhlaq dan ibadah menjadi sebuah media Lembaga pendidikan keislaman (Nizar, 2008: 281).

2) Majelis Taklim

Majelis Ta'lim bila dilihat dari segi tujuannya termasuk lembaga atau sarana dakwah Islamiah secara teratur dan disiplin agar dapat

mengatur dan melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Di dalamnya berkembang prinsip demokrasi yang berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat demi kelancaran pelaksanaan ta'lim sesuai dengan tuntutan pesertanya (Hasbullah, 1996: 94).

Menurut akar katanya, istilah majelis taklim tersusun dari gabungan dua kata yaitu: Majelis yang berarti tempat dan taklim yang berarti pengajaran. Majelis Taklim menurut musyawarah Majelis Taklim se-DKI Jakarta tahun 1980 adalah lembaga pendidikan non formal Islam yang memiliki kurikulum tersendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur dan diikuti oleh jama'ah yang relaif banyak, dan bertujuan untuk membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antara manusia dengan Allah SWT (Putra, 2007: 150).

3) Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Tradisional Islam untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menemukan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat (Kuntowijoyo, 2014: 30).

Pesantren sebagai lembaga pendidikan membawa penilaian tersendiri bahwa sistem pesantren sesuatu yang bersifat asli Indonesia, sehingga dengan sendirinya bernilai positif dan harus dikembangkan (Nizar, 2009: 286).

4) Madrasah: Madrasah berasal dari akar kata *darrasa*, yaitu belajar, sedangkan madrasah berarti tempat belajar atau sekolah formal. Madrasah adalah lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah yang mengajarkan perpaduan antara ilmu agama Islam dan ilmu umum, maupun ilmu berbasis ajaran Islam (Nata, 2012: 204). Madrasah Indonesia sepenuhnya merupakan usaha penyesuaian atas tradisi persekolahan yang dikembangkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Dengan struktur dan mekanisme yang hampir sama, dan sekilas madrasah merupakan bentuk lain dari sekolah dengan muatan dan corak keislaman (Simanjuntak, 1973: 24).

b. Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan secara etimologis berasal dari beberapa kata dalam bahasa Arab, yaitu: *Pertama*, *al-ta`lim* yang berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan dan keterampilan. *Kedua*, *al-tarbiyah* yang berarti mengasuh, mendidik, dan memelihara, dan *ketiga*, adalah istilah *al-ta'dib* yang berarti proses mendidik yang lebih tertuju pada pembinaan dan penyempurnaan akhlaq atau budi pekerti peserta didik (Nizar, 2001:86).

Zakiah Daradjat menjelaskan bahwa

“Pendidikan Islam adalah pembentukan kepribadian, pendidikan Islam ini telah banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan sesuai dengan petunjuk ajaran Islam, karena itu pendidikan Islam tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga bersifat praktis atau pendidikan Islam adalah sekaligus pendidikan iman dan pendidikan amal”(Sabri, 2005: 150).

Dalam implementasi pendidikan Islam sangat memperhatikan aspek yang mendukung atau unsur yang turut mendukung terhadap tercapai tujuan dari pendidikan Islam. Adapun aspek atau unsur-unsur tersebut Adalah :

- 1) Pendidik : Pendidik ialah orang yang memikul pertanggung jawaban untuk mendidik (Marimba,1989:37).
- 2) Peserta Didik: Dalam perspektif Psikologi peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun psikis menurut fitrahnya masing-masing. Sebagai Individu yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju kearah titik optimal kemampuan fitrahnya (Desmita,2012: 39).
- 3) Kurikulum: Kata “kurikulum” mulai dikenal sebagai istilah dalam dunia kurikulum diartikan dua macam, yaitu:
 - a) Sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari siswa disekolah atau perguruan tinggi untuk memperoleh ijazah tertentu.
 - b) Sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan atau jurusan (Hamalik, 2008:3).
- 4) Tujuan Pendidikan : Tujuan pokok pendidikan adalah membentuk anggota masyarakat menjadi orang-orang yang berpribadi, berperikemanusiaan maupun menjadi anggota masyarakat yang dapat

mendidik dirinya sesuai dengan watak masyarakat itu sendiri, mengurangi beberapa kesulitan atau hambatan perkembangan hidupnya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun mengatasi problematikanya (Nazili Shaleh Ahmad, 2011: 3). Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Herera (Muhadjir Darwin, 2010: 271) bahwa “melalui pendidikan, transformasi kehidupan sosial dan ekonomi akan membaik, dengan asumsi bahwa melalui pendidikan, maka pekerjaan yang layak lebih mudah didapatkan”.

5) Media dan Metode

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Menurut Sanaky (2009:4), bahwa media pembelajaran adalah sarana pendidikan yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektifitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pengajaran. Selanjutnya, Notoatmodjo (2003:71), mengatakan bahwa media pembelajaran adalah alat-alat yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan bahan pengajaran. Alat bantu ini lebih sering disebut alat peraga, karena berfungsi membantu dan memperagakan sesuatu dalam proses pembelajaran.

Metode dalam kamus bahasa indonesia didefinisikan metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan.

Supriyono (2009:1). mendefinisikan metode pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran

3. Organisasi Masyarakat

Menurut De Vito yang dikutip oleh Burhan Bungin menjelaskan bahwa pengertian organisasi adalah sebagai suatu kelompok individu yang diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Jumlah anggota organisasi bervariasi, dari tiga atau empat hingga mencapai ribuan orang. Organisasi memiliki tujuan umum dan tujuan spesifik, untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibuat norma aturan yang diatuhi oleh semua anggota organisasi (Bungin, 2006: 272).

Pengertian organisasi menurut Thoha yang dikutip oleh Silalahi dalam bukunya “Studi tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi” (2003:124) mengemukakan bahwa Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang menunjukkan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Hubungan yang berstruktur ini disebut hirarki dan konsekuensi dari hirarki ialah adanya kategori kelompok superior dengan kelompok subordinasi.

Peradaban modern pada hakikatnya sangat bergantung pada organisasi sebagai bentuk pengelompokan sosial yang paling rasional dan efisien. Organisasi menggabungkan sumber daya tenaga manusia yang dimilikinya dengan sumber daya lain, yaitu dengan menjalin para pemimpin, kelompok pengikut atau pekerja, dan sistem serta struktur (Etzioni, 1985: 1).

Sedangkan Pengorganisasian (*organizing*) merupakan suatu cara pengaturan pekerjaan dan pengalokasian pekerjaan di antara para anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat di capai secara efisien (Stoner dalam Maryono, 2018: 334).

Menurut Syani dalam (Maryono, 2018: 334), secara metodologis pengorganisasian adalah suatu cara menajerial yang berhubungan dengan usaha-usaha kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan pembagian kerja.

Kata “kemasyarakatan” berasal dari kata “masyarakat” yang berarti kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama sebagai satu kesatuan yang besar yang saling membutuhkan, memiliki ciri-ciri yang sama sebagai kelompok (Zain, 2001: 872).

Sebagaimana telah diketahui bahwa aktivitas organisasi masyarakat berkaitan langsung dengan kepentingan seluruh anggota atau pendukung organisasi itu sendiri maka sesuai dengan ilustrasi bagan di atas untuk dapat mengetahui basis masing-masing organisasi masyarakat berdasar aspek kehidupan maka Arbi Sanit menguraikan lebih lanjut dalam tabel di bawah ini (Sanit,2012 184-189.):

Tabel 2.1 Klasifikasi Organisasi Masyarakat berdasar Aspek Kehidupan

ORGANISASI MASYARAKAT	ASPEK KEHIDUPAN
1. Organisasi Politik	Mengacu kepada kekuasaan negara baik dalam rangka memperoleh manfaat darinya, maupun dalam rangka menguasainya;
2. Organisasi Ekonomi	Mencari keuntungan materi berdasarkan tatacara berinteraksi yang didasarkan kepada perhitungan untung rugi;
3. Organisasi Sosial, Kebudayaan dan Agama	Memusatkan perhatian untuk merealisasikan dan melindungi kepentingan masyarakat tanpa mencari keuntungan materi untuk anggota dan organisasi tersebut dan bukan untuk memegang kendali atas kekuasaan negara.

Dalam penelitian ini, Persjarikatan Oelama termasuk organisasi masyarakat Islam sehingga tergolong organisasi Sosial Agama karena selain mengadakan dakwah-dakwah Islam juga Persyarikatan Oelama mengumpulkan dana sumbangan untuk pertolongan pelajar-pelajar dan mendirikan Madrasah untuk memenuhi pendidikan masyarakat.

Organisasi sosial merupakan gabungan dari kedua istilah tersebut dapat diartikan sebagai suatu susunan atau struktur dari berbagai hubungan antara manusia yang terjadi di masyarakat, dimana hubungan tersebut merupakan suatu kesatuan yang teratur. Secara luas organisasi sosial diartikan sebagai jaringan tingkah manusia dalam lingkup yang kompleks pada setiap masyarakat. Secara ringkas organisasi sosial dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian pelapisan terstruktur hubungan antara manusia yang saling ketergantungan (Abdul Syani, 2007: 115).

Organisasi sosial berdasarkan pendekatan sosiologi adalah organisasi sosial sebagai sebuah asosiasi, yaitu sekelompok manusia yang mempunyai tujuan, kepentingan, kegemaran, minat yang sama dan membentuk sebuah organisasi yang tetap (Budiyanto, 2008: 10)

Sedangkan, Organisasi keagamaan merupakan lembaga sosial keagamaan yang memegang peranan penting dalam pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat. Peranan tersebut tampak dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun non formal, serta keaktifan lembaga keagamaan dalam kegiatan amal dan pembinaan kerukunan hidup beragama. Masyarakat masih merasakan manfaatnya yang besar dari peran lembaga keagamaan dalam pembinaan keagamaan masyarakat. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya (Soekanto, 2000: 184).

Organisasi keagamaan Menurut Weber dalam (O'Dea, 1996:70). tumbuh berkembang secara khusus semula berasal dari pengalaman keagamaan yang dialami oleh pendiri organisasi itu dan para pengikutnya. Dari pengalaman demikian lahir suatu bentuk perkumpulan keagamaan yang kemudian menjadi organisasi keagamaan yang sangat terlembaga.

Organisasi islam merupakan sebuah nilai yang diambil dan dikembangkan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau kegiatan dengan menggunakan nilai-nilai islam yang sesuai dengan pedoman islam yaitu al-qur'an dan hadist (Nottingham,1985: 154).

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian dilakukan terhadap sumber-sumber skunder, antara lain sumber dalam buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, atau disertasi yang isinya mencerminkan ada hubungan terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian terhadap sumber-sumber tersebut, setidaknya ada beberapa sumber yang dipandang relevan dengan masalah yang diteliti, diantara yang berjudul :

1. Skripsi Budy Nurichsyan Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon (Tahun 2017) yang berjudul “Peran Kyai Haji Abdul Halim 1887-1962 dalam Mendirikan Organisasi Persatuan Umat Islam di Majalengka” dalam penelitiannya disebutkan perjalanan hidup Kiai Haji Abdul Halim penuh dengan perjuangan, khususnya dalam penyebaran agama Islam dan melawan penjajahan yang terjadi di Indonesia melalui organisasi yang didirikannya yang dimulai dari Persjarikatan Oelama (PO), Serta proses berdirinya Persatuan Umat Islam (PUI) dari peleburan dua organisasi islam yaitu POI dan PUII. Beberapa hal yang mendasari adanya peleburan organisasi ini adalah keprihatinan sebagai anggota kedua organisasi tersebut dengan apa yang terjadi waktu itu yaitu adanya perpecahan organisasi Islam di Indonesia waktu itu, seperti pisahnya beberapa unsur Masyumi. Persatuan Umat Islam (PUI) lahir dari dua organisasi yang mematri persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya dalam kalangan intern umat Islam, hal ini dapat di lihat dari tujuan pertama dari

PUI yaitu mencapai Islam Raya serta kebahagiaan ummat Islam di dunia dan akherat.

2. Skripsi Norris Noer Herwandy Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia (Tahun 2014) yang berjudul “Kiprah K.H. Abdul Halim dalam Bidang Politik Tahun 1912-1955”. dalam penelitiannya disebutkan K.H. Abdul Halim terlahir dengan nama Otong Syatori pada 26 Juni 1887. Awal mula kiprah K.H. Abdul Halim dalam bidang politik adalah ketika menjadi ketua Syarekat Islam cabang Majalengka pada tahun 1912 ketika masa penjajahan Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, K.H. Abdul Halim masuk menjadi anggota MIAI, Chuo Sangi In, dan BPUPKI. Sesudah Indonesia merdeka, K.H. Abdul Halim menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Karesidenan Cirebon, Bupati Masyarakat Majalengka, penggagas berdirinya Partai Masyumi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Provinsi Jawa Barat dan anggota konstituante. Selama berkiprah dalam bidang politik, K.H. Abdul Halim berusaha untuk menumbuhkan kesadaran berpolitik dan bernegara di kalangan umat Islam. Terungkapnya kiprah dan peranan K.H. Abdul Halim dalam bidang politik dari masa penjajahan Belanda sampai dengan masa Indonesia merdeka diharapkan akan menimbulkan kesadaran dan potensi juang bagi generasi muda sekarang.

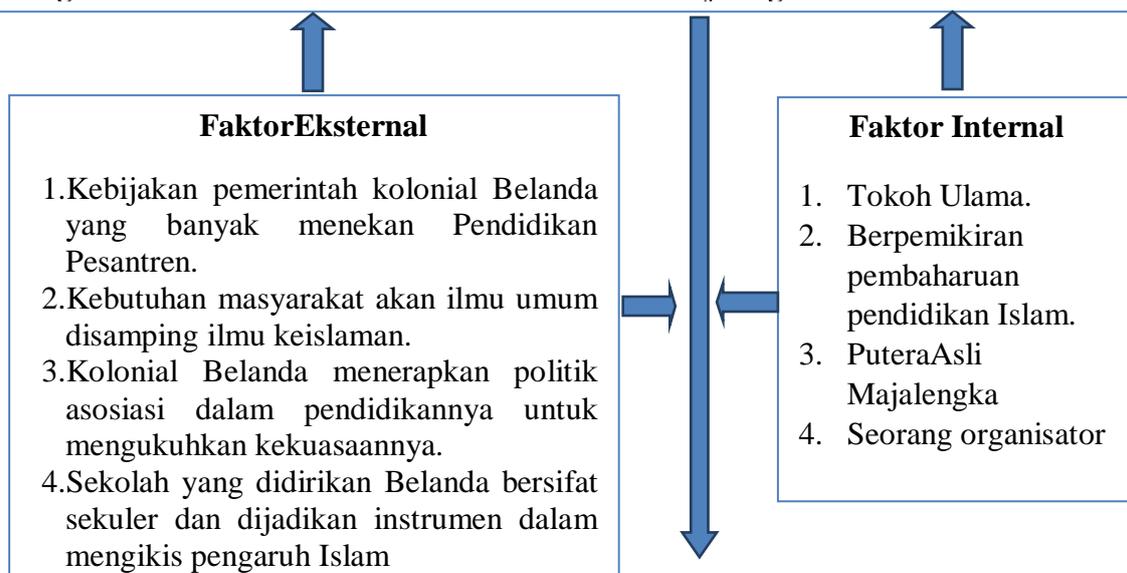
C. Kerangka Pemikiran

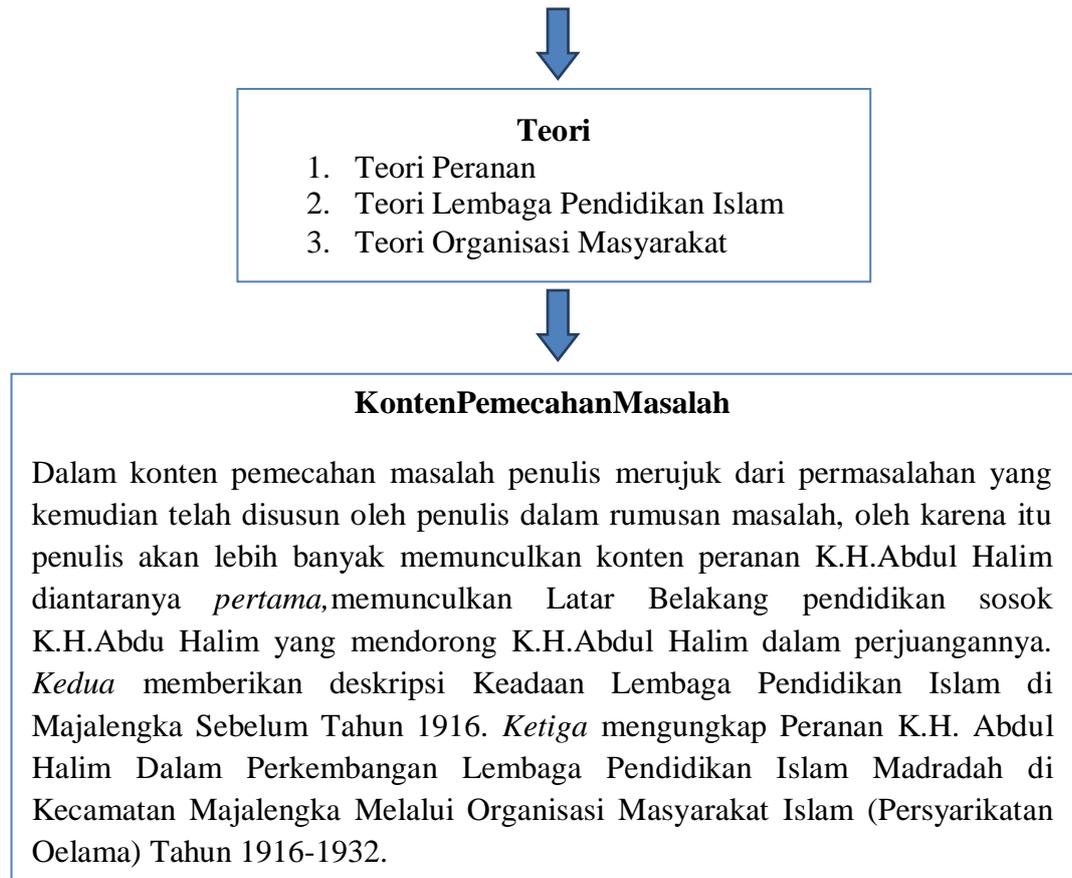
Merumuskan kerangka pemikiran dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk membantu dalam proses pengumpulan sumber-sumber atau bukti. Kerangka pemikiran juga membantu dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

Kerangka Pemikiran

Problematika/Permasalahan

Pada tahun 1911 kepulangan K.H. Abdul Halim dari Mekkah ke tempat kelahirannya, memperhatikan adanya penindasan, kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan yang dialami masyarakat Majalengka dirasakan karena kurangnya pendidikan umum yang bisa dinikmati masyarakat. Pesantren mendalami ilmu keislaman dan tidak memperhatikan ilmu umum karena dianggap datang dari non muslim sedangkan pendirian sekolah Belanda memiliki tujuan menghilangkan unsur agama dalam pendidikan, sekolah Belanda dijadikan sebagai instrumen mengurangi, akhirnya bertujuan menghilangkan pengaruh Islam dan mengukuhkan kekuasaannya salah satunya lewat pendidikan. Penulis merumuskan permasalahan pada rumusan permasalahan dengan mengambil benang merah dari seorang tokoh yang telah menimba Ilmu di Mekkah, yang memiliki pemikiran bahwa perbaikan kondisi masyarakat harus dimulai dari perbaikan pendidikan dengan memadukan gaya lembaga pesantren dan sekolah. Tokoh yang memiliki pemikiran berbeda dengan tokoh tradisional Kecamatan Majalengka. Pesantren pada tahun 1911 umumnya mengutamakan ilmu akhirat saja dan mengabaikan ilmu duniawi, yang mendorong K.H. Abdul Halim mengadakan Perubahan dalam lembaga Pendidikan Islam dengan mendirikan lembaga Pendidikan madrasah dan Kweek School di Majalengka.





D. Anggapan Dasar

Penulis dapat mengartikan anggapan dasar merupakan suatu asumsi dasar dari penelitian yang diangkat oleh penulis, selain itu, anggapan dasar adalah suatu yang diyakini kebenarannya oleh peneliti, yang akan berfungsi sebagai hal-hal yang dipakai untuk tempat berpijak bagi peneliti dalam melakukan penelitian selanjutnya (Arikunto, 1998 : 9).

Berdasarkan keterangan diatas, anggapan dasar dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Peranan K.H.Abdul Halim dalam Perkembangan Madrasah di Kecamatan Majalengka sangat besar. Pendidikan Islam sangat besar. Peranannya

Sebagai Kiyai dan seorang organisator berhasil mendirikan organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, mendirikan Madrasah pertama dan Kweekschool (sekolah guru) di Majalengka. Perjuangan K.H.Abdul Halim banyak disalurkan melalui organisasi-organisasinya.

2. Peranan K.H.Abdul Halim dalam merubah cara pendekatan pendidikan islam dengan mendirikan Madrasah yang memiliki arti penting untuk pendidikan islam kearah pendidikan formal, menciptakan siswa berintelektual berkhilak islam. Menjadikan Madrasah sebagai landasan untuk menepis sekulerisme yang mulai menyebar dari Kolonial Belanda dan paham-paham yang dijadikan instrumen menghilangkan Islam (Menjadikan islam termarginalkan oleh modernisasi).